KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Natuna

Nomor Registrasi: 21.03-132707-2023

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SIPENTING NATUNA Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah Stunting Natuna

1.2. Dibuat Oleh

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembagan Daerah (bp3d)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Nama Inisiator

MOESTOFA ALBAKRY, SE

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

kesehatan

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang berada di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas wilayah 264.198,37 km dengan luas daratan 2.001,30 km2 dan lautan 262.197,07 km2, memiliiki 154 pulau dengan 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni, dengan jumlah penduduk sebesar 85.449 (BPS.2023), dengan 17 Kecamatan, 70 desa dan 7 kelurahan.

Visi Kabupaten Natuna sebagaiman tercantum didalam RPJMN 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”, dimana misi pertama adalah Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting guna mencapai visi daerah, kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dan masalah kesehatan menjadi bagian yang sangat berpengaruh pada perkembangan sumber daya manusia Kabupaten Natuna selain sektor pendidikan.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan unit kerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, dimana berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengendalian daerah. dan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
5. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah;
6. pelaksanaan pengkajian Kebijakan Daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi Daerah;
7. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
8. pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan dengan stunting, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Natuna berkedudukan sebagai Wakil Ketua, Koordinator Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan serta sebagai anggota

pada Bidang Bidang Data, Monev dan Knowledge Management.

2. Kondisi Saat ini

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting secara nasional semakin menurun jika dilihat dari tahun 2021 prevalensi stunting di angka 24,4 persen dan turun menjadi 21,6 persen di tahun 2022, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia target pemerintah angka prevalensi stunting menjadi 14,4 persen di tahun 2024.

Natuna termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota menjadi lokus stunting yang ditetapkan pada tahun 2018 berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan prevalensi stunting di angka 37,2 persen. Prevalensi stunting Kabupaten Natuna mengalami fluktuatif baik hasil pengukuran melalui ePPGBM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Berdasarkan pengukuran SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Natuna mengalami kenaikan dari 17,8% (2021) menjadi 18% (2022), demikian halnya dengan hasil pengukuran ePPGBM juga mengalami kenaikan dari 11,77% (2021) naik menjadi 11,93% (2022).

Berdasarkan pengukuran ePPGBM se Provinsi Kepulauan Riau, prevalensi stunting Kabupaten Natuna untuk Tahun 2022 dan 2023 tertinggi se Provinsi Kepulauan Riau, dan berdasarkan pengukuran SSGI Kabupaten Natuna tahun 2022 menempati urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Lingga.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabpaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Dan untuk Kabupaten Natuna
pelaksanaan intervensi penurunan stunting belum berjalan dengan baik dan berakibat pada masih tingginya prevalensi stunting Kabupaten Natuna, hal ini disebabkan oleh :

1. Lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah pengampu stunting dengan kecamatan dan desa dalam kegiatan penurunan stunting.
2. Aksi penurunan stunting belum terlaksana secara terpadu dan terintegrasi dimana masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan dan desa berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatan percepatan penurun stunting dan belum terfokus pada kelompok sasaran.
3. Belum adanya sistem informasi terpadu yang bisa dijadikan penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penanganan stunting secara holistik integratif tematik dan spasial.
4. Data stunting sulit di akses karena berada di sistem perangkat daerah tertentu.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Dalam proyek perubahan ini terdapat beberapa tujuan antara lain :

i. Tujuan Jangka Pendek, yaitu Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan instansi yang terlibat, Pembentukan tim efektif, Pembuatan Perubahan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pembuatan sistem informasi perencanaan terpadu pencegahan stunting (SIPENTING NATUNA), Mengumpulkan, merekap dan menginput data informasi stunting, Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia, Uji coba SIPENTING NATUNA(2), Evaluasi Uji coba SIPENTING NATUNA, Sosialisasi SIPENTING NATUNA.

ii. Tujuan Jangka Menengah, yaitu : Mengelola dan meng-update data stunting, Mengupload data spasial ke dalam SIPENTING NATUNA

iii. Tujuan Jangka Panjang, yaitu Membuat basis data secara digital yang mampu diakses publik, Pengembangan sistem data

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari proyek perubahan ini, antara lain :
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penurunan stunting di Kabupaten Natuna.
2. Manfaat bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah memudahkan dalam mengkoordinasikan, menskronisarikan dan memastikan pelaksanaan program kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintahan desa, serta memudahkan
pelaksanaan pemantauan
3. Manfaat bagi Organisasi perangkat daerah adalah kemudahan dalam pelaksanaan intervensi dan sinkronisasi dengan program kegiatan pencegahan stunting dari pemerintah desa. Dan manfaat bagi pemerintah desa adalah memudahkan dalam intervensi dan kemudahan memperoleh data sasaran.
4. Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat terbebas dari stunting dan turunnya prevalensi stunting menjadi indikator kesejahteraan, kecerdasan, kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik.

1.13. Hasil Inovasi

Adapun kondisi yang diharapkan dari proyek perubahan ini, adalah sebagai berikut :
a. Tercapainya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Natuna, sebagaimana target pemerintah pada tahun 2024 sebesar 14%, melalui peningkatan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan terpadu.
b. Terwujudnya perencanaan, pelaksaanaan dan pemantauan secara holistik intergratif tematik dan spasial pada program penurunan stunting di perangkat daerah dan desa.

Berdasarkan penjelasan penyebab diatas dan kondisi yang diharapkan maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya terobosan atau inovasi dalam rangka penuruan angka stunting dengan menguatkan perencana, pelaksanaan dan pemantauan penanganan stunting secara holistik integratif tematik dan spasial dengan memanfaatkan penggunaaan digitalisasi, dan akan diuraikan dalam penulisan Proyek Perubahan dengan judul Strategi Pencegahan Prevalensi Stunting melalui SiPENTING NATUNA (Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah Stunting)

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

20-11-2023

1.15. Waktu Implementasi

02-12-2023

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

3.923161611732484, 108.3384329468627

1.21. Kematangan

59.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah	• Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	11-30 SDM	• SK Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Prevalensi Stunting Melalui Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah Stunting
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	• DPA Perubahan Tahun 2023 yang mendukung inovasi SI PENTING
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Screenshot Aplikasi SI PENTING
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek/training/TOT)	• Undangan Bimtek Pelatihan SIPENTING • Undangan Pelatihan Sistem Informasi SI PENTING
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Tim Koordinasi dan Pengelolaan Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	• Panduan teknis aplikasi SIPENTING
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• SK Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Prevalensi Stunting Melalui Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah Stunting
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Screenshot web aplikasi, layanan telpon dan whatsapp
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Tim Koordinasi dan Pengelolaan Data Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Screenshot Web Aplikasi SIPENTING di laman web Pemkab NATUNA
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Tahapan dalam penciptaan inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Inovasi SIPENTING di muat di beberapa Media Berita
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Inovasi SIPENTING
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
	pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png		
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia